

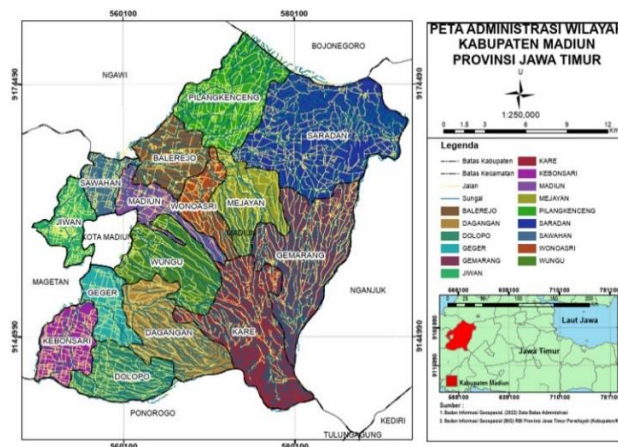
## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun

#### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi 7°12' – 7°48'30" Lintang Selatan dan 111°25'45" – 111°51' Bujur Timur. Kabupaten Madiun berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah Utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di sebelah Barat, Kabupaten Ponorogo di sebelah Selatan, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Timur.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten  
Madiun

Secara administratif, Pemerintahan Kabupaten Madiun terbagi menjadi 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 198 Desa dengan luas wilayah mencapai 1.010,86 Km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Kebonsari	14	-	47,45
2	Geger	19	-	36,61
3	Dolopo	10	2	48,85
4	Dagangan	17	-	72,36
5	Wungu	12	2	45,54
6	Kare	8	-	190,85
7	Gemarang	7	-	101,97
8	Saradan	15	-	152,92
9	Pilangkenceng	18	-	81,34
10	Mejayan	11	3	55,22
11	Wonoasri	10	-	33,93
12	Balerejo	18	-	51,98
13	Madiun	12	1	35,93
14	Sawahan	13	-	22,15
15	Jiwan	14	-	33,76
Jumlah		198	8	1.010,86

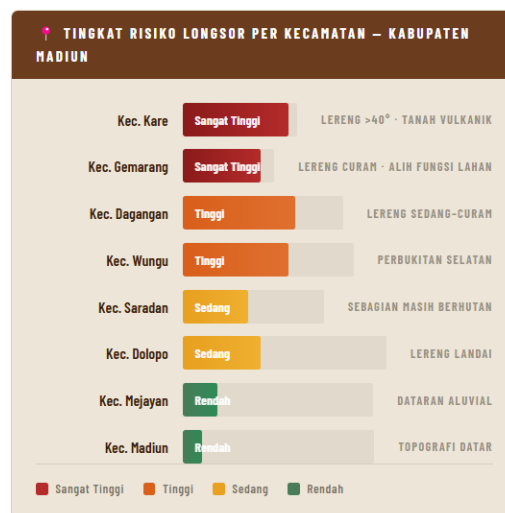
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Wilayah Kabupaten Madiun terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi sehingga wilayahnya berada pada ketinggian yang bervariasi. Berdasarkan ketinggian wilayahnya, Kabupaten Madiun dapat dibagi menjadi dua zona, yaitu zona perbukitan dan pegunungan (barat-barat laut) serta zona dataran aluvial (tengah-timur). Zona perbukitan dan pegunungan yang berada pada wilayah lereng Gunung Wilis (2.169 mdpl) mencakup Kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan sebagian Kecamatan Saradan memiliki karakteristik lereng terjal (>40%) dengan tanah vulkanik yang rawan longsor, erosi, dan banjir bandang pada bagian hulu sungai. Zona

dataran aluvial berada pada dataran rendah yang terbentuk dari endapan aluvial Sungai Madiun. Zona ini meliputi Kecamatan Balerejo, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Jiwan, Madiun, dan Kebonsari dengan ancaman utama berupa banjir genangan akibat luapan sungai saat musim hujan puncak.

Kecamatan Kare merupakan kecamatan yang berada pada wilayah tertinggi di Kabupaten Madiun yaitu 543 mdpl. Selain itu, terdapat Kecamatan Dagangan dengan tinggi wilayah 246 mdpl dan Kecamatan Gemarang dengan tinggi wilayah 235 mdpl. Wilayah yang berlereng berpotensi mengalami longsor, seperti Kecamatan Gemarang, Dagangan, Kare, dan Wungu.

Gambar 2.2 Tingkat Risiko Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, 2026

Kabupaten Madiun memiliki iklim tropis dengan rentang temperatur udara antara 22°C hingga 32°C. Kabupaten Madiun yang berada di wilayah tropis memiliki dua musim utama, yaitu musim

hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan Kabupaten Madiun rata-rata berkisar antara 1.500 – 2.500 mm. Curah hujan bervariasi setiap bulannya dengan intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember. Curah hujan yang cukup tinggi dapat mendukung aktivitas pertanian, khususnya sektor tanaman pangan yang menjadi salah satu potensi utama daerah.

Kabupaten Madiun memiliki posisi strategis dari segi transportasi dan konektivitas antarwilayah. Wilayah ini dilalui jalur utama penghubung Surabaya-Yogyakarta sehingga memudahkan mobilitas penduduk, distribusi komoditas, dan aktivitas perdagangan regional. Selain itu, Kabupaten Madiun dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa yang dapat memperkuat aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.1.2 Kondisi Kependudukan dan Ekonomi**

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Madiun adalah 737.875 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 662,59 penduduk per km<sup>2</sup>. Pada 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Madiun didominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun) jumlahnya mencapai 465,62 ribu atau 62,99% dari total populasi. Di sisi lain, usia lanjut (umur lebih dari 60 tahun) serta anak-anak yang berumur 0-14 tahun masing-masing sebesar 19,61% dan 17,41%.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kebonsari	59.370
2	Geger	65.268
3	Dolopo	59.753
4	Dagangan	52.378
5	Wungu	57.718
6	Kare	34.165
7	Gemarang	34.373
8	Saradan	70.922
9	Pilangkenceng	54.990
10	Mejayan	47.519
11	Wonoasri	35.652
12	Balerejo	44.408
13	Madiun	38.517
14	Sawahana	25.408
15	Jiwan	57.434
Kabupaten Madiun		737.875

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024, hanya 5,71% penduduk Kabupaten Madiun yang sudah menamatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Penduduk Kabupaten Madiun mayoritas memiliki jenjang pendidikan SMA.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Madiun Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024)

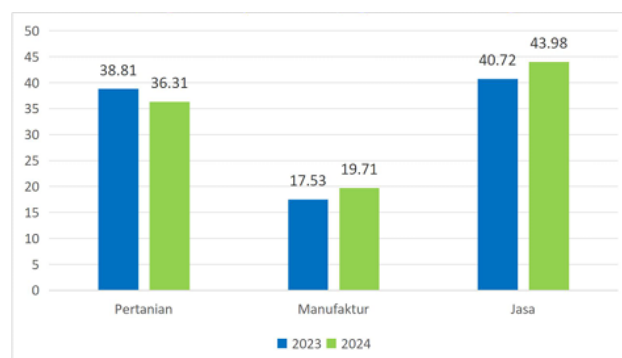
No	Jenjang Pendidikan	Persentase Penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	15,45
2	Belum Tamat SD	20,02
3	Tamat SD	15,55
4	SMP	17,4
5	SMA	25,87
6	D1 dan D2	0,32
7	D3	1,09
8	S1	4,07

9	S2	0,22
10	S3	0,008

Sumber: Databoks, 2025

Pada Agustus 2024, angkatan kerja di Kabupaten Madiun mencapai 444.286 orang dengan penduduk yang sudah bekerja sebanyak 425.001 orang dan pengangguran sebanyak 19.285 orang. Penyerapan tenaga kerja dibagi menjadi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Tiga lapangan pekerjaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan), Manufaktur (petambangan dan penggalian; industri pengolahan, listrik, gas dan air; serta konstruksi), serta Jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah, jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Pada Agustus 2023 dan Agustus 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sektor pertanian mengalami penurunan daya serap pekerja dibandingkan dengan

sektor manufaktur dan sektor jasa. Penurunan daya serap pekerja sektor pertanian pada Agustus 2024 sebesar 2,50 persen poin. Sementara itu, lapangan pekerjaan jasa menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya.

## **2.2 Gambaran Pertanian Kabupaten Madiun**

### **2.2.1 Kondisi Pertanian Kabupaten Madiun**

Kabupaten Madiun merupakan daerah lumbung padi Jawa Timur bagian barat dengan luas areal panen padi sebesar 73.420 Ha yang memproduksi padi sebanyak 437.458 ton GKG pada tahun 2024. Luas panen padi tersebut mengalami penurunan sekitar 1.360 Ha dibandingkan dengan tahun 2023. Selain padi, komoditas unggulan dari Kabupaten Madiun adalah palawija, durian, kakao, kopi, mangga, rambutan, bawang merah, kentang, wortel, serta produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati. Durian dan kakao banyak dibudidayakan di Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kare. Sementara itu, kebun kopi dengan skala besar dibudidayakan di Dusun Kandangan, Kecamatan Kare.

Wilayah Kabupaten Madiun yang terbagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi mendukung berkembangnya potensi pertanian di Kabupaten Madiun. Wilayah yang berada pada dataran tinggi, seperti Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang, dan Kecamatan Dagangan, cocok untuk budidaya sayuran, durian, kakao, dan kopi. Di sisi lain, wilayah yang berada pada dataran rendah cocok untuk budidaya padi, palawija, mangga, dan sebagainya.

### 2.2.2 LP2B Kabupaten Madiun

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian. Perlindungan LP2B di Kabupaten memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan LP2B seluas 21.587,4 Ha atau sekitar 66% dari keseluruhan Lahan Baku Sawah (LBS) yang dimiliki Kabupaten Madiun. Dalam memenuhi target LP2B seluas 87% dari keseluruhan LBS, masih kurang hampir 8.000 Ha.

Di sisi lain, Kabupaten Madiun juga menghadapi tekanan dari kebutuhan pengembangan kawasan industri. Pemerintah Kabupaten Madiun mengeluarkan 431 hektare lahan dari kawasan LP2B untuk dialokasikan sebagai kawasan industri (Radar Madiun, 2025). Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa peningkatan investasi dan industrialisasi diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah. Selain itu, pembangunan Tol Trans Jawa dan jalur ganda kereta api (*double track railway*) yang melintasi Kabupaten Madiun turut mendorong konversi lahan pertanian produktif secara signifikan.

Masyarakat juga mengambil peran dalam terjadinya alih fungsi LP2B di Kabupaten Madiun. Persawahan yang telah ditetapkan sebagai

LP2B dialihfungsikan menjadi non-pertanian. Berikut beberapa bukti dari alih fungsi LP2B yang terjadi di Kabupaten Madiun.

Gambar 2.4 Bukti Alih Fungsi LP2B di Kabupaten Madiun



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

### **2.3 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun**

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun merupakan instansi yang memiliki tugas untuk membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam sektor pertanian dan perikanan. Sebagai instansi teknis yang membidangi urusan pertanian dan perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun memiliki cakupan tugas yang sangat luas, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, hingga pemberdayaan penyuluh pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Madiun yang terdiri dari 15 kecamatan.

Visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun disusun sejalan dengan visi dan misi Bupati Madiun sebagai bentuk dukungan terhadap arah pembangunan daerah. Kesamaan tersebut

menunjukkan bahwa program dan kegiatan dinas diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Visi Bupati adalah “Madiun Bersih, Sehat dan Sejahtera“. Misi Bupati Madiun adalah:

1. Menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, serta memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi.
2. Memaksimalkan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.
3. Menumbuhkan perekonomian yang pro investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan, serta memiliki keunggulan kompetitif, mandiri dan berdaya saing.
4. Membangun sarana dan prasarana kewilayahan lebih memadai yang merata dan berkeadilan.
5. Meningkatnya pembangunan manusia yang ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang lebih baik.
6. Meningkatkan harmonisasi sosial masyarakat yang lebih adil dan makmur.

